



:: KERJA SAMA

Kantor Pos Layani Pembayaran PBB

YOGYAKARTA – Pemkot Yogyakarta menggandeng PT Pos Indonesia untuk melayani pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB. Kemarin naskah kerja sama ini ditandatangani oleh Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelola Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta Kadri Renggono dan Kepala Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Area VI Jateng DIY Tobiin.

Kerja sama ini untuk mempermudah masyarakat membayar PBB sebagai kewajibannya. Dengan nota kesepahaman atau MoU, ada semakin banyak pilihan layanan bagi masyarakat untuk membayar PBB. "Setelah kami kelola sendiri sejak 2012, kami baru membuka layanan di BPD DIY. Dengan kerja sama ini harapannya akan ada pilihan lain untuk masyarakat," tutur Kadri Renggono usai penandatanganan MoU.

Disinggung target kerja sama, Kadri menyebutkan, masih belum bisa diungkap. Hal tersebut berkenaan dengan kebiasaan masyarakat untuk membayar PBB di batas akhir. Sesuai jadwal yang disusun, untuk pembayaran PBB jatuh tempo paling lambat pembayaran adalah 30 September mendatang.

Kadri menginformasikan, realisasi capaian dari PBB baru berkisar di angka 30-50% dari target senilai Rp46 miliar yang telah ditetapkan. Hanya memperhitungkan capaian di 2012 dan 2013, target tersebut dapat tercapai. Hingga saat ini tercatat untuk piutang PBB yang belum dibayarkan di 2012 dan 2013 mencapai Rp10 miliar.

Dengan penandatanganan

"Setelah kami kelola sendiri sejak 2012, kami baru membuka layanan di BPD DIY. Dengan kerja sama ini harapannya akan ada pilihan lain untuk masyarakat."

KADRI RENGONO

Kepala DPDPK Kota Yogyakarta

naskah kerja sama, Tobiin mengatakan, pihaknya akan langsung menghidupkan program layanan pembayaran PBB secara online. Saat ini dengan berbagai pengembangan program layanan yang dilakukan, pelayanan

pembayaran PBB secara online di PT Pos bukan persoalan sulit.

Diharapkan layanan pembayaran PBB tersebut sudah dapat aktif pada September pekan depan sebelum jatuh tempo. "Kami tinggal *switch on* programnya. Dengan program kami, warga Kota Yogyakarta bisa membayar PBB dari manapun, tidak harus pulang ke Yogyakarta. Termasuk warga luar Yogyakarta yang memiliki tanah dan bangunan di Yogyakarta yang harus dibayar pajak kepemilikannya," ujar Tobiin.

Kerjasama pembayaran PBB secara online menurut Tobiin menjadi program kerja sama lanjutan. Sebelumnya telah dilakukan kerja sama antara PT Pos dengan BUMD PDAM Tirtamarta.

● **maha deva**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Mei 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005